



► REKAYASA LALU LINTAS

Durasi Malioboro Bebas Kendaraan Ditambah

Yosef Leon
yosef@harianjogja.com

JOGJA—Dinas Perhubungan (Dishub) DIY berencana memperpanjang durasi pelaksanaan Malioboro semi pedestrian dari yang semula hanya tiga jam menjadi lima atau enam jam. Kebijakan ini ditempuh guna mengatasi kemacetan akibat pertumbuhan kendaraan yang signifikan di wilayah setempat, terutama Kota Jogja.

Semi pedestrian Malioboro diterapkan beberapa tahun lalu dengan jam berlaku sejak pukul 18.00 WIB-21.00 WIB. Selama penerapannya, hanya bus *Trans Jogja*, kendaraan penanganan darurat, dan kendaraan khusus, yang boleh melintas di jantung Kota Jogja itu.

Durasi Malioboro...

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub DIY, Rizki Budi Utomo, mengatakan instansinya berencana memperpanjang durasi Malioboro semi pedestrian. Rencana ini merespons kondisi lalu lintas yang kerap padat di kawasan perkotaan terutama pada saat musim liburan, tak terkecuali Malioboro dan sekitarnya. "Tahun ini kami akan coba perpanjang waktunya, nanti akan mulai dari jam 3 atau 4 sore sampai 9 malam dari semula jam 6 sore sampai 9 malam," jelasnya, Rabu (18/9).

Menurut Rizki, sejauh ini implementasi Malioboro semi pedestrian cukup sukses. Namun, masih terjadi kepadatan di seputaran kawasan yang menuju Malioboro seperti Titik Nol Kilometer, Jalan Mataram, Jalan Abu Bakar Ali sampai ke Jalan KH. Ahmad Dahlan. "Maka yang akan kami evaluasi tentu kawasan itu apakah nanti diperlebar misalnya sampai Tugu. Jadi mungkin setelah perpanjangan waktu baru beralih ke zonasinya yang diperluas," ujarnya.

Dia menjelaskan kawasan sirip Malioboro nantinya juga diatur ulang. Dishub DIY akan berkoordinasi dengan Dishub Jogja untuk memetakan jalur sirip mana yang akan dijadikan satu arah dan dua arah, sehingga bisa menyambung ke jalur sirip lainnya di kawasan Malioboro. "Yang bisa dilakukan hanya membatasi pergerakan kendaraan dan itu kami coba dengan semi pedestrian Malioboro," ungkapnya.

Di sisi lain, Dishub DIY akan mencoba memaksimalkan penggunaan *Trans Jogja* bagi masyarakat maupun wisatawan yang akan berkunjung ke pusat Kota Jogja dan lokasi lainnya. Ini merupakan strategi menarik dan mendorong yakni dengan menarik masyarakat untuk naik kendaraan umum serta mendorong pengendara secara sukarela beralih ke transportasi umum. "Tapi *Trans Jogja* ini kan paling hanya bisa menekan setengah saja dari pergerakan kendaraan harian," kata Rizki. Hal lain yang mungkin bisa

diterapkan untuk mengantisipasi kemacetan terutama di area perkotaan adalah dengan menerapkan tarif parkir yang mahal bagi kendaraan pribadi. "Namun ini kan ranahnya kabupaten kota yang dibahas melalui DPRD masing-masing wilayah dan saya rasa itu akan efektif menekan pemakaian kendaraan pribadi," ungkapnya.

Jumlah Kendaraan

Kasat Lantas Polresta Jogja, AKP Maryanto, menyebut kemacetan di Kota Pelajar salah satunya disebabkan oleh pertumbuhan kendaraan yang tak sebanding dengan pertumbuhan sarana dan prasarana jalan yang ada.

Setiap pekannya, kata Maryanto, berdasarkan data tercatat kendaraan di Kota Jogja bertambah setidaknya hingga 3.000 unit. "Jalannya itu-itu saja tetapi peningkatan volume kendaraan ini per minggu rata-rata bisa 3.000 kendaraan baru. Bisa dibayangkan sebulan jadi berapa, sehingga volume atau kepadatan lalu lintas tentunya akan semakin ada," ujar Maryanto, Selasa (17/9).

Meski padat, Maryanto mengatakan kepadatan lalu lintas di Kota Jogja masih terkondisi. Sebab, kendaraan tak *stuck* dan masih terus berjalan meski ada perlambatan.

Dia mengaku telah bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Jogja dan DIY untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi di Kota Jogja, utamanya saat momentum liburan. Misalnya menerapkan berbagai rekayasa lalu lintas dan *car free night* di kawasan Malioboro.

"Lalu, sudah dalam rencana kegiatan, nanti bahwa pembatasan kendaraan-kendaraan bus wisata masuk Kota Jogja nanti akan ada kantong-kantong parkir yang kita siapkan. Kepada masyarakat yang tidak berkepentingan di kawasan Malioboro untuk bisa menghindari di ruas penggal jalan yang mengarah ke Malioboro. Bagi wisatawan harap bersabar untuk bisa masuk ke wilayah

Malioboro," ujar dia.

Berpikir Cepat

Sementara itu, Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM menyebut Pemda DIY dan kabupaten kota di wilayah setempat harus berpikir cepat dalam merespons tingginya pertumbuhan kendaraan pribadi yang tak sebanding dengan penambahan jalan baru. Salah satu yang bisa dimaksimalkan adalah transportasi publik, tapi masih ada tantangan yakni mengubah habit masyarakat yang masih enggan menggunakan angkutan umum. "Apalagi jika ke depan berlaku pedestrian penuh di Malioboro, selanjutnya apa? Ya harus diperluas ke kawasan lain seperti Kotabaru atau yang lain dan yang utama persiapan besarnya bagaimana membangun transportasi publik di seluruh Jogja," kata Ketua Pustral UGM Ikaputra.

Ikaputra menjelaskan rencana uji coba untuk memperpanjang durasi Malioboro semi pedestrian sangat bagus dilakukan. Menurutnya dengan kebijakan itu masyarakat akan terbiasa dan lama kelamaan akan menjadi budaya yang perlahan-lahan bisa mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi saat menuju pusat perkotaan. "Kalau diperluas zonasi semi pedestriannya tentu harus ada transportasi publik yang memadai," katanya.

Pemda DIY dan kabupaten kota pun harus berpikir luas soal cakupan dan jalur yang dilewati oleh transportasi umum. Jika perlu jadi penghubung antar kabupaten kota sampai ke pelosok wilayah. Dengan demikian, harus ada *hub* yang menjadi perantara dan berkumpulnya transportasi publik di wilayah ini, sehingga akan berjalan lebih optimal. "Dengan publik *transport* yang lebih luas jangkauannya ke Malioboro tidak lagi pakai kendaraan pribadi. Kalau begitu kan masyarakat yang dari Kentungan, Bantul, Jalan Solo, Wates dan yang lain bisa pakai itu dan jauh lebih bagus," jelasnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005